

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat, dalam banyak kasus dinegara berkembang, tidak otomatis menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan (*disparity*). Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral. Petunjuk awalnya adalah wilayah maju terus berkembang pesat meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor unggulan yang berkontribusi besar bagi pembangunan, sedangkan sektor non unggulan yang membebani. Ketimpangan pembangunan terjadi dalam skala lokal dan nasional. Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan apabila tidak mampu dieliminir secara hati-hati dapat menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan serta dalam konteks makro sangat merugikan proses dan hasil pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah.

Ketimpangan pembangunan selain itudisebabkan karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi geografis wilayah atau daerahnya. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda. Karena itu tidaklah mengherakan bila bilamana pada setiap daerah terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*under developed regional*). Terjadinya ketimpangan antarwilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah bersangkutan (Sjafrizal. 2017:107).

Umumnya juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain, diantaranya kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang kegiatan ekonomi juga kurangnya investasi atau penanaman modal yang dapat membantu mendorong proses pembangunan pada wilayah atau daerah tersebut. Pembangunan wilayah, secara spasial tidak selalu merata. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan cepat, sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber daya yang dimiliki, adanya kecenderungan penanam modal (*investor*) memilih daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, telekomunikasi, perbankan, asuransi dan tenaga kerja terampil. Selain itu adanya ketimpangan redistribusi pendapatan dari pemerintah pusat ke daerah. Tidak hanya beberapa faktor saja yang dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan di suatu wilayah atau daerah, namun kemiskinan nyatanya diyakini ikut memiliki pengaruh penting sebagai salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan suatu wilayah atau daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa orang miskin, anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Amanat ini secara tegas dan lugas menegaskan bahwa problema kemiskinan menjadi salah satu hal yang utama yang harus menjadi program pembangunan negara ini.

Menurut para ahli (antara lain andre bayo ala, 1981), kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset,

organisasi sosial politik., dan pengetahuan serta keterampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-mensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Asyad,2004:237).

Minimnya tingkat pendidikan dan terbatasnya pekerjaan yang dapat dilakukan oleh penduduk miskin ini mengakibatkan rendahnya penghasilan dan tabungan yang dapat disimpan mereka, sehingga tetap mengakibatkan mereka berada di garis kemiskinan

Tabel 1.1
PDRB 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliyaran/Rupiah)
Tahun 2015-2020

Kab/Kota.	PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oku	8 230,96	8 556,80	8 904,37	9 339,33	9 867,73	9 866,72
Oki	16 667,05	17 412,46	18 301,92	19 205,73	20 180,57	20 228,21
Muara Enim	31 254,50	33 372,45	35 761,99	38 854,44	41 581,53	41 594,54
Lahat	10 539,02	10 786,01	11 265,29	11 723,72	12 382,33	12 427,42
Musi Rawas	11 049,70	11 629,97	12 214,77	12 921,71	13 680,64	13 713,75
Musi Banyuasin	39 278,56	40 128,98	41 341,25	42 670,21	44 620,40	44 604,66
Banyuasin	16 236,00	17 192,42	18 060,42	18 982,00	19 973,44	19 999,57
OKU Selatan	4 707,44	4 951,56	5 175,05	5 436,56	5 710,53	5 731,91
OKU Timur	8 294,87	8 806,82	9 103,28	9 493,39	10 012,56	10 054,10
Ogan Ilir	6 118,42	6 432,46	6 763,04	7 113,26	7 482,61	7 492,94
Empat Lawang	2 963,80	3 098,26	3 213,15	3 349,00	3 470,33	3 473,40
Pali	3 736,27	3 930,14	4 164,80	4 430,55	4 703,60	4 716,96
Mura Utara	4 760,11	4 888,80	5 116,03	5 331,25	5 552,59	5 573,36
Palembang	82 345,07	87 073,35	92 476,41	98 471,25	104 308,14	104 043,04
Prabumulih	4 295,41	4 579,64	4 820,84	5 101,77	5 384,91	5 375,37
Pagar Alam	1 892,91	1 976,33	2 071,44	2 158,09	2 234,01	2 234,27
Lubuk Linggau	3 428,91	3 646,07	3 876,14	4 106,07	4 340,12	4 334,37

Sumber: Badan Pusat Statistik(BPS) Sumatera Selatan (diolah) 2020.

Terlihat pada Tabel 1 menunjukkan perbedaan dan Perkembangan PDRB 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sangat signifikan dilihat dari PDRB masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2020. Dari tabel tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antar wilayah karena perbedaan sangat terlihat dari PDRB yang dimiliki masing masing Kabupaten/Kota, PDRB tertinggi tahun 2015 yaitu KotaPalembang sebesar 82.345,07(Miliyaran/Rupiah) di ikuti Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 39.278,56(Miliyaran/Rupiah) dan Kabupaten Muara Enim sebesar 31.254,50 (Miliyaran/Rupiah). Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB terendah

tahun 2015 yaitu Kota Pagar Alam sebesar 1.892,91 (Milyaran/Rupiah) di ikuti Kabupaten Empat Lawang sebesar 2.963,80 (Milyaran/Rupiah) dan Kota Lubuk Linggau sebesar 3.429,91 (Milyaran/Rupiah)

Tabel 1.2
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota Di Sumatera Selatan
Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Persen)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oku	13,22	13,29	12,95	12,61	12,77	12,75
Oki	17,08	16,03	15,75	15,28	15,01	14,73
Muara Enim	14,54	13,56	13,19	12,56	12,41	12,32
Lahat	18,02	17,11	16,81	16,15	15,92	15,95
Musi Rawas	15,13	14,3	14,24	13,76	13,37	13,5
Musi Banyuasin	18,35	17,27	16,75	16,52	16,41	16,13
Banyuasin	12,45	11,72	11,47	11,32	11,33	11,17
Oku Selatan	11,58	10,95	10,98	10,64	10,53	10,85
Oku Timur	11,24	11,29	11	10,57	10,43	10,43
Ogan Ilir	14,43	13,8	13,58	13,19	13,31	13,36
Empat Lawang	13,33	12,54	12,44	12,25	12,3	12,63
Pali	14,88	14,23	14,53	13,81	13,47	12,62
Musi Rawas Utara	19,73	20	19,49	19,12	19,12	19,47
Palembang	12,85	12,04	11,4	10,95	10,9	10,89
Prabumulih	12,12	11,44	11,42	11,39	11,61	11,59
Pagar Alam	9,64	9,19	8,89	8,77	8,9	9,07
Lubuk Linggau	15,16	13,99	13,12	13,02	12,95	12,71

Sumber: Badan Pusat Statistik (Bps) Sumatera Selatan (data diolah) 2020.

Terlihat pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa perbedaan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sangat signifikan dilihat dari tingkat kemiskinan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2020. Dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi dari Kabupaten/Kota lainnya pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 19.73 (Persen) di

ikuti Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 18.35 (Persen) dan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 17.08 (Persen). Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2015 yaitu Kota Pagar Alam sebesar 9.64 (persen), di ikuti Ogan Komering Ulu Timur sebesar 11.24 (persen), dan kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 11.58 (persen).

Jika dilihat dari rata rata data PDRB dan tingkat kemiskinan perbedaan sangat signifikan terjadi pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2020. Fenomena ketimpangan wilayah yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan umumnya terjadi karena berbagai hal yaitu perbedaan pembangunan perekonomian antar wilayah antar daerah maju dan daerah terbelakang karena adanya ketidakseimbangan didalam beberapa unsur pembangunan, baik itu pemerataan kesejahteraan, fasilitas, maupun infrastruktur. Hal ini disebabkan kandungan demografi yang dimiliki tiap masing-masing daerah. Selain itu adanya kecenderungan penanam modal (*investor*) yang memilih daerah untuk menanamkan modalnya dengan melihat kondisi serta fasilitas yang tersedia sehingga investor lebih memilih daerah yang telah memiliki fasilitas yang lengkap, maka wilayah yang terbelakang tertinggal jauh dari wilayah yang maju. Dengan ini mengakibatkan timbulnya tingkat kemiskinan pada masing-masing Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2015 sampai Tahun 2020 peringkat pertama nilai PDRB terbesar adalah Kota Palembang. Secara umum perekonomian Kota Palembang bertumpuh pada lapangan usaha sekunder dan tersier khususnya pada lapangan usaha industri pengeolahan dan lapangan usaha kontruksi. Sedangkan pada urutan kedua yang mempunyai perekonomian

terbesar adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin terletak pada Lintas tran Sumatera serta mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi pertambangan migas di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan terbesar di Provinsi Sumatera Selatan sehingga menempatkan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai daerah sumber migas di Pulau Sumatera. Potensi pertambangan migas di Kabupaten Musi Banyuasin sekitar 40 persen dari total potensi migas di Provinsi Sumatera Selatan. Kota Lubuk Linggau dan pagar alam sebagai kontributor terendah perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Secara umum sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mempunyai penopang utama pada lapangan usaha primer.

Tingkat kemiskinan pada posisi pertama Kabupaten Musi Rawas Utara dan posisi kedua Musi Banyuasin (Muba), Kabupaten yang kaya akan sumber daya alam dan hutan tapi justru memiliki angka kemiskinan tertinggi di Sumatera Selatan karena, Kabupaten ini sulit mendapat sentuhan pembangunan atau bantuan pemerintah, ini lah penyebab utama kedua Kabupaten itu memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Kota pagar alam dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tingkat kemiskinan tergolong rendah, karena Kabupaten ini memiliki potensi pertanian dan pariwisata yang cukup untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

berdasarkan uraian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka perumusan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Apakah ada Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah ketimpangan pembangunan mempengaruhi tingkat kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah ada ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan serta untuk mengetahui apakah pengaruh ketimpangan pembangunan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis.

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan, atau pengetahuan mengenai ketimpangan pembangunan.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan Bagi pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan, dan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

